



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memperkuat akuntabilitas pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan secara objektif tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 telah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sehingga perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
11. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
12. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan-Kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.

- (4) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam Pengukuran Kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 9

IKU digunakan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan dan evaluasi capaian kinerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2025



BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah.
2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB
4.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP
		Maturitas SPIP	Level	Tingkat kematangan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan dilakukan dengan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan.
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	Ukuran yang secara kuantitatif menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan, demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
6.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi	%	$\frac{\text{PDRB ADHK } n - \text{PDRB ADHK } (n - 1)}{\text{PDRB ADHK } (n - 1)} \times 100$
		Laju Inflasi	%	$[(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_3)^{1/3}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $\text{Inf}_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...
7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$
8.	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
9.	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Angka	Ukuran statistik yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, dengan nilai yang berkisar antara 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan ekstrem)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
10.	Meningkatnya penanganan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$

BUPATI PEMALANG,
ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	Hasil Penilaian LAN RI
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai	Hasil penilaian mandiri IKK atas kebijakan yang mendukung program prioritas daerah yang sudah diberlakukan minimal satu tahun pada dimensi evaluasi kemanfaatan kebijakan pada sub dimensi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Nilai	Hasil penilaian mandiri IKK atas kebijakan yang mendukung program prioritas daerah yang sudah diberlakukan minimal satu tahun pada dimensi evaluasi kemanfaatan kebijakan pada sub dimensi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang administrasi umum	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah bidang administrasi umum	Nilai	Hasil penilaian mandiri IKK atas kebijakan yang mendukung program prioritas daerah yang sudah diberlakukan minimal satu tahun pada dimensi evaluasi kemanfaatan kebijakan pada sub dimensi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

B. SEKRETARIAT DPRD

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	Rerata cakupan layanan Sekretariat DPRD (persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas, persentase dokumen daerah yang dibahas dan persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

C. INSPEKTORAT DAERAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas integritas daerah	Indeks Integritas Nasional	Angka	Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. 1. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/ atau organisasi. formula: $(0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7)$ 2. Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. formula: $0,0817 X1 + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 X11 + 0,0762 X12$ 3. Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				formula : $0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3$ Formula penghitungan indeks integritas nasional $0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5)$ dimana: X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI
2.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/evidence, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Pemalang dan para stakeholders baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

D.DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Indeks Pendidikan	Angka	$\frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	Penghitungan nilai domain $r_j = \sum_{k=1}^m w_{\{l j n k\}} \cdot X_{\{j n k\}}$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
				r_{jn} : Nilai indeks pada domain ke-i w_{ijn} : Bobot pada masing-masing indikator x_{jnk} : Nilai indikator nomor ke-j pada domain ke-i Keterangan: Perhitungan nilai IPP $IPP_i = \sum_{k=1}^m w_{(ti)} r_i$ Keterangan: IPP_i: Nilai indeks IPP w_{ti}: Bobot pada masing-masing domain
		Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	Indeks Dimensi = $\frac{\text{nilai aktual}-\text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum}-\text{nilai minimum}}$
				<i>Indeks Indeks Pembangunan Olahraga</i> $= \frac{\{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9)\}}{9}$ Keterangan: D1= Dimensi IPO pertama, D2= Dimensi IPO kedua,dst
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah}$
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
3.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat}}{\text{Total jumlah pemuda (16 – 30 tahun)}} \times 100$
4.	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralimpic)	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional, nasional dan internasional
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

E. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah wisman tahun } n - \text{Jumlah wisman tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisman tahun } (n - 1)} \times 100$
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	%	$\frac{\text{Pelaku ekraf potensial th } n - \text{Pelaku ekraf potensial th } (n - 1)}{\text{Pelaku ekraf potensial tahun } (n - 1)} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang tercatat}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

F. DINAS KESEHATAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk sejak lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur berdasarkan kondisi kesehatan dan faktor demografi saat ini. Angka Usia Harapan Hidup berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik.
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kematian ibu	Orang	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam kurun waktu satu tahun.
		Jumlah kematian balita	Orang	Jumlah kematian balita usia 0-59 bulan dalam kurun waktu satu tahun.
		Prevalensi Stunting	%	$\frac{\text{Jumlah balita kategori stunting (pendek sangat pendek)}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB} > 90\%, \text{ penemuan TB} > 90\% \text{ dan minimal 2 dari ODHIV dalam pengobatan ARV yang dites viral load dengan hasil viral load tersuspensi 95\%, eradikasi frambusia dan eliminasi malaria}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100$
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	$\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan rata capaian indeks SPM hipertensi dan DM} > 80\%, \text{ Angka depresi pada usia} \geq 15 \text{ tahun tidak lebih dari 1\% dan sudah ada SK Kepala Puskesmas tentang KTR}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100$
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	$\frac{\text{Jumlah fasyankes (puskesmas, pustu dan RSUD) sesuai standar}}{\text{Fasyankes (puskesmas, pustu dan RSUD)}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

G.DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase PPKS (penyandang pemerlu kesejahteraan sosial) yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Seluruh PPKS tahun dasar}} \times 100$
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	Hasil Evaluasi dari Badan Pusat Statistik
		LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	$\text{Laju Pertumbuhan Penduduk (\%)} = \frac{Pt - Pt-1}{Pt-1} \times 100\%$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				keterangan: Pt = jumlah penduduk tahun berjalan Pt-1 = jumlah penduduk tahun sebelumnya
2.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	$\frac{\text{SPM yang tercapai}}{\text{Total SPM yang ada}} \times 100$
		Persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	$\frac{\text{Jumlah KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{target KPM pada tahun dasar}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga: 1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. menghitung skor disetiap dimensi; 3. menghitung Ibangga
		IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024, maka nilai indeks dimensi penyusun dan nilai indeks komposit IPBK menggunakan skala 0-100 dan bermakna positif. Nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik dan sebaliknya.
4.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu : kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, pasar tenaga kerja
		Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Indeks Perhitungan pemenuhan Kabupaten Layak Anak

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

H.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	$\frac{\begin{matrix} \text{Rerata \% kepemilikan dokumen kependudukan} \\ (\% \text{ kepemilikan KTP, \% kepemilikan KK} \\ \% \text{ kepemilikan KIA}) \end{matrix}}{2}$ Rerata % kepemilikan dokumen pencatatan sipil (kepemilikan akta perkawinan, akta cerai, kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan Layanan Adminduk	%	Rerata cakupan layanan adminduk (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Adminduk, Pengelolaan profil Kependudukan)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	%	Rata-rata jumlah nilai komposit ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang ID=DLD+DS+DE+DL+DA+DTPD Ket :

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				ID : Indeks Desa D:Dimensi
2.	Meningkatnya capaian Desa mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah Desa kategori mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya investasi di kabupaten	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah investasi tahun } (n - 1)} \times 100$
2.	Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp/ Tahun	Jumlah investasi seluruh perusahaan atau lembaga usaha di Kabupaten Pemalang yang dilaporkan
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

K. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	$\frac{\text{Jumlah volume usaha koperasi tahun } n - \text{volume usaha koperasi tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah volume usaha koperasi tahun } n - 1} \times 100$
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	$\frac{\text{Pelaku usaha yang dibantu buruh tetap}}{\text{Total angkatan kerja}} \times 100$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{PDRB sektor perdagangan}}{\text{PDRB total}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Volume usaha koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	$\frac{\text{UMKM yang naik kelas menjadi kategori usaha kecil}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$
3.	Meningkatnya nilai ekspor	Nilai Ekspor	Nilai	Jumlah nilai ekspor selama 12 bulan dari semua pelaku usaha ekspor
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

L. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penanganan pengangguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	$\frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100$
				$\frac{\text{Peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan}}{\text{Jumlah tenaga kerja di perusahaan}} \times 100$
4.	Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{jumlah IKM tahun } n - 1}{\text{Jumlah IKM tahun } (n - 1)} \times 100$ Dimana: IKM = Industri Kecil Menengah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

M. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	Angka	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
2.	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Nilai Domain Layanan	Nilai	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
		Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	Hasil evaluasi dari BPS Pusat
		Nilai Domain Tatakelola	Nilai	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

N. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, meliputi: 1. Jalan 2. Irigasi 3. Air minum 4. Drainase 5. persampahan 6. Infrastruktur lainnya

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum	%	Rata-rata capaian indikator program urusan pekerjaan umum
3.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang sesuai tata ruang}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100$
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

O.DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja transportasi dan akses hunian layak yang aman, terjangkau, berkelanjutan serta pertanahan berkeadilan	VC Rasio	%	$\frac{\text{Jumlah volume lalu lintas}}{\text{kapasitas jalan}} \times 100$
		Backlog Rumah	Unit	Jumlah Rumah Tangga - Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Hunian Tetap
		Luasan Kawasan Kumuh	Ha	luasan wilayah yang ditandai dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, seperti kepadatan tinggi, minimnya akses infrastruktur, dan lingkungan yang tidak sehat
2.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas	Indeks	$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum)}}{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum) yang seharusnya tersedia}} \times \text{Rata2 Bobot}$
3.	Meningkatnya akses hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	$\frac{\text{Jumlah rumah Tidak Layak Huni yang tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak layak Huni}} \times 100$
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	$\frac{\text{Jumlah segketa tanah garapan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah sengketa tanah garapan}} \times 100$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%
		Indeks pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks	SPM yang tercapai dibagi total SPM yang ada dikali 100%
4.	Terlaksananya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	$\frac{\text{Jumlah sertifikat yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pemohon sertifikat hak atas tanah}} \times 100$
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

P. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	Indeks Kualitas Air	Indeks	$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ dimana: IKA = Indeks Kualitas Air W = faktor pembobot I = sub-indkes (Q-Nilai)
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ dimana : IKU = Indeks Kualitas Udara I_{INA} = Rata-rata indeks SO₂, NO₂ dan PM_{2,5}

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ dimana : IKL = Indeks Kualitas Lahan IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan
2.	Meningkatnya hasil pengujian air, udara dan tanah	Kualitas air permukaan pada parameter BOD	mg/l	Hasil uji air permukaan parameter BOD
		Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO2	µg/m3	Hasil uji udara ambien parameter SO2 dan NO2
		Luas Tutupan Lahan	Ha	Luas tutupan lahan pendukung itu yang menjadi kewenangan kabupaten
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	Perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat.
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

Q.DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian	Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB	%	Kontribusi Pertanian, perikanan dan kehutanan dalam PDRB ADHB tahun n

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
	dan kontribusi perikanan dalam perekonomian	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indicator 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP
2.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan per hektar per tahun (Padi)	Kw/Ha	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi per Hektar per tahun / Luas Panen
		Produktivitas hortikultura per hektar per tahun (Nanas)	Kw/Ha	Jumlah Produksi Hortikultura Nanas per Hektar per tahun / Luas Panen
		Produktivitas perkebunan per hektar per tahun (Kopi)	Kw/Ha	Jumlah Produksi Perkebunan Kopi per Hektar per tahun / Luas Panen
		Produksi peternakan unggulan	Kg	Jumlah produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras
		Total produksi perikanan (tangkap, budidaya, olahan hasil)	Ton/Tahun	Total Produksi Perikanan Terdiri Dari Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Budidaya dan Produksi Olahan Hasil Perikanan
3.	Meningkatnya keanekaragaman dan pemenuhan kecukupan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan Bobot setiap kelompok pangan yg sudah ditetapkan (9 kelompok pangan: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan, lainnya).
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

R. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	$\frac{\text{UPLM}}{\text{ULM}} \times 100$
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	$\frac{\text{Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik on site maupun online}}{\text{Jumlah penduduk Kabupaten pada tahun yang sama}} \times 100$
3.	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey/kajian kegemaran membaca masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah		Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks ini digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki predikat pengelolaan arsip minimal B}}{\text{Total OPD}} \times 100$
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

S. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran	Persentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kebakaran}}{\text{Jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup}} \times 100$
		Jumlah kasus kebakaran	Kasus	Kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten pemalang di tahun n
2.	Meningkatnya penegakan Perda/ Perkada dan penanganan kebakaran	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	$\frac{\text{Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100$
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah	Angka	Nilai dari Komponen Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja
2.	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi	%	Menyandingkan substansi dan tahapan penyusunan dokrenda yang dilakukan dengan substansi dan tahapan penyusunan sesuai regulasi

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan program dengan prioritas Daerah dan prioritas nasional	%	$\frac{\text{Jumlah program yang sesuai dengan prioritas Daerah dan Nasional}}{\text{semua jumlah program}} \times 100$
4.	Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Indeks inovasi daerah	Angka	Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

U. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Jumlah hasil pengukuran pada masing-masing Dimensi IPKD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	$\frac{\text{Jumlah mandatory spending yang telah terpenuhi sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah mandatory spending yang harus dipenuhi}} \times 100$
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Indeks	Jumlah hasil perkalian bobot nilai dengan kategori masing-masing parameter IPA
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

V. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	Hasil Penilaian BKN
2.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai	Hasil Penilaian BKN
3.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Hasil Penilaian BKN
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagamaan dalam masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat harmoni dan kerukunan antar kelompok sosial, budaya, dan agama di suatu wilayah. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan menggabungkan nilai dari berbagai indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama: persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap layanan publik.
2.	Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat.	Konflik SARA	Kasus	Jumlah konflik SARA
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

X. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Di mana <i>hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. <i>Capacity</i> (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah nilai IKD
2.	Meningkatnya ketahanan Daerah	Indek Ketahanan Daerah	Indeks	Jumlah total dari 7 indikator yaitu Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan (0,06), Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu (0,06), Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik (0,075), Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (0,105), Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,21), Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (0,35), dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (0,14)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

Y. KECAMATAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah desa di Kecamatan yang memiliki status desa mandiri}}{\text{Jumlah desa yang ada di Kecamatan tersebut}} \times 100$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
	masyarakat di wilayah Kecamatan			
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

BUPATI PEMALANG,
ANOM WIDIYANTORO